BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkara penggelapan menurut Peraturan Kepala Kepolisian nomor 8 Tahun 2021 dapat di hentikan penyidikanya melalui pendekatan *Restorative Justice* dan demikian pula menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1691/2020, tidak termasuk perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative justice* karena tidak termasuk kategori Tindak pidana ringan.
2. Walaupun dalam diri terdakwa di temukan hal-hal yang meringankan antara lain benda hasil kejahatannya yaitu motor Yamaha NMAX telah dikembalikan kepada korban, terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan terdakwa telah dianggap sebagai bagian dari keluarga korban, namun hal tersebut bukan berarti bahwa majelis Hakim dapat menerapkan *Restorative justice* karena tindak pidana penggelapan yang ancamannya 4 tahun tidak termasuk kategori tidak termasuk tindak pidana ringan sehingga penerapan *restorative justice* dalam pertimbangan hakim berdasarkan peraturan mahkamah agung tersebut tidak tepat.
3. Oleh karena menurut Perma 1691/2020 perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative justice* telah di tentukan secara limitatif yaitu hanya untuk tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hkum dan perkara narkoba yang masuk kategori ringan maka oleh karena dalam putusan pengadilan Negeri Tanjung Selor Perkara Nomor 39/PID.B/2020/PN TJS adalah perkara penggelapan Pasal 372 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara maka jelas bahwa perkara

tersebut tidak termasuk kategori tindak pidana ringan. Oleh karena itu tidak dapat diterapkan pendekatan *Restorative justice* sebagaimana dalam pertimbangan hakim pada putusan perkara tersebut.

B. Saran

Berdasar kesimpulan tersebut diatas dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya peraturan Mahkamah Agung berkenaan dengan *restorative justice* sejalan dengan peraturan kepala kepolisian RI dan peraturan kepala Kejaksaan RI yaitu tidak mengecualikan tindak pidana tindak pidana yang ancaman maksimalnya 5 tahun terbuka kemungkinan diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara penggelapan dengan pendekatan *restorative justice* hendaknya berpedoman pada Perma Nomor 1691/2020.
3. Walaupun bermaksud baik dalam arti hendak mewujudkan *moral justice dan sosial justice*, namun hendaknya majelis hakim dalam memeriksa keputusan perkara termasuk perkara penggelapan dengan pertimbangan *restorative justice* untuk menjaga kepastian dan ketertiban hendaknya tetap berpegang kepada *legal justice*.